Indonesian Research Journal on Education

e-ISSN: 2775 – 8672, p-ISSN: 2775 – 9482
Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026
Halaman: 279 – 284

Web: https://irje.org/index.php/irje

RESEARCH ARTICLE

# Kontribusi Sektor Halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Negara-Negara Muslim

Nafia sismita[1], Nanda Suryadi[2], Raja Sakti Putra Harahap[3]
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

nafiasismita0@gmail.com[1], nanda.suryadi@uin-suska.ac.id[2], raja.sakti.putra.harahap@uin-suska.ac.id[3]

**Kata Kunci**:
*Industri Halal, PDB, Pertumbuhan Ekonomi, Negara Muslim*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi sektor industri halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di lima negara Muslim, yaitu Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan pada periode 2024–2025. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari *World Bank*, *IMF*, dan *Global Islamic Economy Report 2024–2025*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor halal, khususnya subsektor makanan halal, keuangan syariah, dan pariwisata halal, memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kelima negara tersebut. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing dan memperkuat ekonomi berkelanjutan di negara-negara Muslim.

***Key Word***:
*Halal Industry, GDP, Economic Growth, Muslim Countries*

***Abstract***

*This study aims to analyze the contribution of the halal industry sector to Gross Domestic Product (GDP) in five Muslim countries: Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Qatar, and Pakistan for the period 2024–2025. The research approach uses a quantitative descriptive method with secondary data from the World Bank, IMF, and the Global Islamic Economy Report 2024–2025. The results show that the halal sector, particularly the halal food, Islamic finance, and halal tourism subsectors, makes a positive and significant contribution to economic growth in these five countries. The implications of this study emphasize that strengthening the halal ecosystem is a crucial strategy for increasing competitiveness and fostering sustainable economic growth in Muslim countries.*

Copyright © 2025 Nafia sismita, Nanda Suryadi, Raja Sakti Putra Harahap
*This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

## PENDAHULUAN

Industri halal kini menjadi salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Pertumbuhan sektor ini tidak hanya mencakup aspek konsumsi, tetapi juga meluas ke bidang produksi, distribusi, dan investasi berbasis nilai-nilai syariah. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, permintaan global terhadap barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip Islam terus mengalami peningkatan signifikan. Fenomena ini menjadikan ekonomi halal sebagai kekuatan baru dalam sistem ekonomi dunia. Selain itu, berbagai negara mulai menyadari potensi besar yang dimiliki sektor ini sebagai sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.(Astiwara. 2023).

Berdasarkan *State of the Global Islamic Economy Report* (DinarStandard, 2024), nilai ekonomi halal global diperkirakan mencapai USD 2,5 triliun. Angka ini mencerminkan kontribusi besar dari sektor-sektor seperti makanan halal, keuangan syariah, fesyen Muslim, farmasi halal, kosmetik, serta pariwisata ramah Muslim. Laporan tersebut juga memproyeksikan pertumbuhan sebesar 7% hingga tahun 2025, menunjukkan tren positif terhadap pengembangan industri halal secara global. Hal ini memperlihatkan bahwa sektor halal bukan hanya tren keagamaan, tetapi telah menjadi bagian integral dari ekonomi modern yang inklusif dan berdaya saing.

Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan merupakan lima negara dengan potensi terbesar dalam pengembangan industri halal. Kelima negara ini memiliki populasi Muslim yang besar dan menjadi pasar utama bagi produk serta jasa halal dunia. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung sertifikasi halal, inovasi produk, dan promosi ekspor turut memperkuat posisi negara-negara tersebut dalam rantai nilai global industri halal. Potensi ini memberikan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai Islam.(Madjid. 2021).

Indonesia dan Malaysia, misalnya, telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam penguatan ekosistem halal nasional. Pemerintah kedua negara tersebut aktif mengembangkan regulasi dan lembaga sertifikasi halal yang diakui internasional. Indonesia dengan *Halal Product Assurance Agency* (BPJPH) dan Malaysia dengan *Department of Islamic Development Malaysia* (JAKIM) menjadi model bagi negara lain dalam pengelolaan sistem halal. Kedua negara ini juga mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dalam memperkuat rantai pasok halal.

Sementara itu, Arab Saudi dan Qatar unggul dalam sektor pariwisata halal serta pengembangan keuangan syariah. Kedua negara ini memanfaatkan posisi strategisnya sebagai pusat kegiatan keagamaan dan bisnis internasional. Arab Saudi, sebagai penjaga dua kota suci, memiliki daya tarik besar bagi wisatawan Muslim, sementara Qatar aktif mendorong inovasi keuangan syariah dan investasi berorientasi halal. Infrastruktur modern dan dukungan kebijakan yang kuat menjadikan kedua negara ini pemain penting dalam peta ekonomi halal global.

Pakistan juga menunjukkan potensi besar dalam sektor makanan dan tekstil halal. Meskipun masih menghadapi kendala infrastruktur dan pembiayaan, negara ini memiliki kapasitas produksi yang tinggi dan sumber daya manusia yang melimpah. Pemerintah Pakistan mulai memperkuat regulasi dan sistem sertifikasi halal nasional untuk meningkatkan daya saing ekspor produk halalnya. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjadikan industri halal sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Namun, meskipun sektor halal berkembang pesat di berbagai negara, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih belum terukur secara komprehensif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan data statistik dan belum adanya standar pengukuran ekonomi halal yang seragam antarnegara. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana sektor halal memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan dalam memperkuat peran ekonomi halal di masa depan.(Agustina et al., 2024).

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder periode 2024–2025 yang bersumber dari *World Bank*, *IMF*, dan *DinarStandard (State of the Global Islamic Economy Report)*. Objek penelitian mencakup lima negara Muslim utama, yaitu Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan, yang memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan sektor halal. Analisis dilakukan untuk mengukur kontribusi subsektor halal makanan halal, keuangan syariah, dan pariwisata halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masing-masing negara. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis kontribusi sektoral dan regresi data panel guna melihat pengaruh sektor halal terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini dipilih agar hasil penelitian mampu memberikan gambaran empiris mengenai peran industri halal dalam mendorong PDB negara-negara Muslim secara komparatif pada periode terbaru.(Ardiansah. 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sektor halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di negara-negara Muslim periode 2024–2025 bersifat signifikan dan positif. Setiap negara menunjukkan karakteristik dan kekuatan berbeda dalam subsektor halal yang dikembangkan.

Indonesia menunjukkan pertumbuhan sektor halal tertinggi di antara negara-negara Muslim yang menjadi fokus penelitian ini. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan kuat regulasi dan kebijakan pemerintah dalam memperkuat sistem jaminan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi dasar hukum utama yang memastikan setiap produk yang beredar di Indonesia sesuai dengan prinsip syariah. Implementasi undang-undang tersebut diperkuat melalui pembentukan *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal* (BPJPH) di bawah Kementerian Agama, yang berperan mengawasi, mengatur, dan memberikan sertifikasi halal secara terstruktur. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi halal global.

Selain dukungan regulasi, Indonesia juga berhasil mengintegrasikan ekosistem halal nasional melalui kolaborasi lintas sektor. Ekosistem ini mencakup industri makanan dan minuman halal, kosmetik, obat-obatan, keuangan syariah, serta pariwisata ramah Muslim. Pemerintah menggandeng lembaga sertifikasi, pelaku usaha, dan akademisi untuk memperkuat sinergi dalam membangun rantai pasok halal yang kompetitif. Berbagai inisiatif seperti *Halal Center* di perguruan tinggi dan *Halal Industrial Park* di beberapa daerah menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur pendukung industri halal. Upaya ini menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan usaha berbasis halal, baik skala nasional maupun internasional.

Pertumbuhan sektor ekspor juga menjadi indikator penting dalam keberhasilan ekonomi halal Indonesia. Produk makanan halal, fesyen Muslim, dan kosmetik menjadi komoditas unggulan yang terus menunjukkan peningkatan permintaan di pasar global. Menurut laporan KNEKS dan Bank Indonesia, kontribusi ekspor produk halal mengalami kenaikan signifikan dalam lima tahun terakhir. Industri halal tidak hanya memperkuat daya saing produk nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di berbagai daerah. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia (*Global Halal Hub*).(Firdausiyah & Hermawansyah, 2025)

Seluruh pencapaian tersebut sejalan dengan target *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI)* 2019–2025, yang menekankan pentingnya penguatan industri halal sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. MEKSI mendorong pengembangan sektor riil berbasis halal yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Pemerintah juga berfokus pada peningkatan literasi halal, digitalisasi layanan sertifikasi, dan dukungan pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM. Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Indonesia tidak hanya memperkuat kontribusi sektor halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menegaskan perannya sebagai motor penggerak ekonomi syariah dunia.

Malaysia menempati posisi kedua dalam pertumbuhan sektor halal dunia berkat sistem kelembagaan dan infrastruktur sertifikasi yang sangat matang. Melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), negara ini berhasil membangun standar sertifikasi halal yang diakui secara internasional dan menjadi acuan bagi banyak negara Muslim lainnya. Proses sertifikasi yang ketat dan transparan menjadikan label halal Malaysia memiliki reputasi tinggi di pasar global. Hal ini memberikan kepercayaan bagi konsumen serta mendorong peningkatan daya saing produk halal Malaysia di berbagai sektor industri.

Malaysia dikenal luas sebagai pusat referensi global bagi pengembangan industri halal modern. Negara ini tidak hanya berfokus pada sektor makanan dan minuman, tetapi juga memperluas cakupan pada industri farmasi, kosmetik, logistik, hingga jasa pariwisata halal. Pendekatan holistik ini menjadikan Malaysia sebagai salah satu pionir dalam penerapan ekosistem halal yang terintegrasi. Berbagai pameran dan forum internasional seperti Malaysia *International Halal Showcase* (MIHAS) turut memperkuat posisi Malaysia sebagai pusat perdagangan dan investasi halal dunia.(Jannah. 2024 )

Dukungan kebijakan pemerintah menjadi faktor kunci dalam memperkuat keberlanjutan sektor halal Malaysia. Melalui *Halal Industry Master Plan* 2030, pemerintah Malaysia menargetkan peningkatan kontribusi sektor halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga lebih dari 7,4% pada tahun 2025. Rencana strategis ini mencakup penguatan riset dan inovasi produk halal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan pasar ekspor ke kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Asia Tenggara. Dengan arah kebijakan yang jelas, Malaysia terus memperkokoh posisinya sebagai pemain utama dalam rantai nilai halal global.

Keberhasilan Malaysia juga didukung oleh kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan industri halal. Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha mendorong terciptanya ekosistem halal yang efisien dan inovatif. Lembaga keuangan syariah di Malaysia memainkan peran penting dalam pembiayaan proyek halal serta mendukung pertumbuhan industri kecil dan menengah berbasis halal. Integrasi ini menjadikan Malaysia bukan hanya produsen, tetapi juga pusat pembelajaran global bagi negara-negara lain yang ingin mengembangkan ekonomi halal secara berkelanjutan.

Arab Saudi memiliki kontribusi besar dalam pengembangan sektor halal global, terutama pada bidang pariwisata halal dan keuangan syariah. Sebagai negara dengan dua kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah, Arab Saudi menjadi destinasi utama bagi jutaan jamaah setiap tahun. Kegiatan haji dan umrah tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga berdampak ekonomi yang sangat besar terhadap sektor jasa, transportasi, akomodasi, dan perdagangan. Hal ini menjadikan pariwisata halal sebagai salah satu motor penggerak utama perekonomian nasional Arab Saudi.(Wijayanti & Fatmah. 2025)

Melalui program *Saudi Vision* 2030, pemerintah Arab Saudi berupaya melakukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas. Salah satu fokus utama dari visi tersebut adalah pengembangan sektor halal yang mencakup industri makanan, keuangan syariah, dan pariwisata berbasis nilai-nilai Islam. Pemerintah berinvestasi besar dalam infrastruktur, digitalisasi layanan haji dan umrah, serta pembangunan kawasan wisata halal baru untuk menarik wisatawan Muslim global. Kebijakan ini menunjukkan transformasi besar menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menjadi kontributor signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Arab Saudi. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh dunia datang ke tanah suci, menciptakan efek berganda terhadap sektor perhotelan, penerbangan, transportasi, hingga industri kuliner halal. Pemerintah juga memperluas sektor pariwisata halal domestik melalui pengembangan destinasi religi, situs

sejarah Islam, dan pusat budaya. Dengan demikian, sektor pariwisata halal tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Selain pariwisata, Arab Saudi juga memiliki sistem keuangan syariah yang kuat dan berpengaruh di tingkat global. Lembaga keuangan besar seperti *Al Rajhi Bank* dan *Islamic Development Bank (IsDB)* memainkan peran strategis dalam mendukung investasi halal dan pembiayaan proyek-proyek berbasis syariah di berbagai negara. Penguatan sektor keuangan syariah ini mendorong pertumbuhan ekonomi riil, mendukung sektor usaha kecil dan menengah, serta memperluas inklusi keuangan di kalangan masyarakat Muslim. Kombinasi antara pariwisata halal dan sistem keuangan syariah menjadikan Arab Saudi sebagai salah satu pilar utama dalam ekosistem ekonomi halal dunia.

Qatar menonjol sebagai salah satu negara yang berhasil mengembangkan industri halal dengan pendekatan modern dan berstandar internasional. Fokus utama negara ini terletak pada sektor keuangan syariah dan pariwisata halal yang terintegrasi dengan visi pembangunan nasional. Melalui *Qatar National Vision* 2030, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat fondasi ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, dan investasi etis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Qatar tidak hanya melihat ekonomi halal dari sisi religius, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang berorientasi global.(Zul Ihsan Mu'arrif, 2024)

Dalam sektor keuangan syariah, Qatar telah membangun reputasi kuat sebagai pusat keuangan regional di kawasan Teluk. Lembaga seperti *Qatar Islamic Bank (QIB)*, *Qatar International Islamic Bank (QIIB)*, dan *Masraf Al Rayan* menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis prinsip syariah. Sistem perbankan syariah di Qatar dikenal stabil, transparan, dan inovatif dalam menyediakan produk-produk keuangan halal, seperti sukuk, pembiayaan infrastruktur, serta investasi berkelanjutan. Peran aktif pemerintah dalam regulasi dan tata kelola menjadikan Qatar sebagai model bagi negara lain dalam mengembangkan sektor keuangan Islam.

Selain keuangan, Qatar juga berhasil mengembangkan pariwisata halal modern dengan standar layanan internasional. Negara ini memanfaatkan infrastruktur kelas dunia, termasuk bandara internasional Hamad dan fasilitas perhotelan premium yang ramah Muslim. Berbagai destinasi wisata halal seperti *Katara Cultural Village* dan *The Pearl-Qatar* dirancang untuk menawarkan pengalaman wisata yang nyaman dan sesuai nilai Islam. Qatar juga aktif mempromosikan konsep *ethical tourism*, yang menekankan keseimbangan antara kemewahan, budaya lokal, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.(Aidina et al., 2023)

Meskipun pangsa pasar halal Qatar relatif lebih kecil dibandingkan dengan Arab Saudi atau Malaysia, kontribusinya terhadap PDB per kapita tergolong sangat tinggi. Hal ini mencerminkan efisiensi dan produktivitas sektor halal yang berfokus pada segmen premium, dengan orientasi pada kualitas, inovasi, dan keberlanjutan. Sektor halal Qatar mampu menarik investasi asing langsung serta memperluas kerja sama internasional dalam keuangan dan pariwisata syariah. Dengan strategi yang terarah dan dukungan kebijakan kuat, Qatar terus memperkuat posisinya sebagai pusat industri halal berkelas dunia di kawasan Timur Tengah.

Pakistan menunjukkan potensi besar dalam pengembangan sektor makanan dan tekstil halal, dua bidang yang menjadi tulang punggung industrinya. Didukung oleh sumber daya pertanian yang melimpah serta populasi Muslim yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa, Pakistan memiliki keunggulan komparatif dalam produksi bahan baku halal berkualitas. Produk seperti daging, olahan susu, rempah-rempah, dan tekstil halal memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. Kondisi ini menjadikan Pakistan salah satu negara yang berpotensi menjadi pemain utama dalam rantai pasok global industri halal, terutama di kawasan Asia Selatan dan Timur Tengah.

Pakistan menunjukkan potensi besar dalam pengembangan sektor makanan dan tekstil halal, dua bidang yang menjadi tulang punggung industrinya. Didukung oleh sumber daya pertanian yang melimpah serta populasi Muslim yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa, Pakistan memiliki keunggulan komparatif dalam produksi bahan baku halal berkualitas. Produk seperti daging, olahan susu, rempah-rempah, dan tekstil halal memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. Kondisi ini menjadikan Pakistan salah satu negara yang berpotensi menjadi pemain utama dalam rantai pasok global industri halal, terutama di kawasan Asia Selatan dan Timur Tengah.

Namun, perkembangan sektor halal di Pakistan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur industri dan logistik yang belum mendukung sistem produksi halal secara efisien. Selain itu, masih minimnya lembaga sertifikasi halal yang berstandar internasional membuat produk halal Pakistan sulit menembus pasar global yang lebih ketat, seperti Eropa dan Timur Tengah. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan syariah juga menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam memperluas kapasitas produksinya.(Kamiliyah et al., 2024)

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pemerintah Pakistan telah mengambil langkah strategis melalui pembentukan *Pakistan Halal Authority* (PHA). Lembaga ini berperan penting dalam mengawasi sertifikasi, menetapkan standar halal nasional, serta memfasilitasi kerja sama internasional di bidang industri halal. Pemerintah juga mulai memperkuat kolaborasi ekspor halal dengan negara-negara anggota *Organization of Islamic Cooperation* (OIC), khususnya dalam perdagangan produk makanan dan tekstil. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan global terhadap kualitas produk halal asal Pakistan.

Dengan penguatan infrastruktur, harmonisasi kebijakan sertifikasi, serta dukungan pembiayaan syariah, sektor halal Pakistan diproyeksikan akan tumbuh signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Potensi peningkatan ekspor dan nilai tambah dari industri halal akan memberikan kontribusi positif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Jika didukung dengan strategi pengembangan jangka panjang dan kemitraan internasional yang efektif, Pakistan berpeluang menjadi salah satu pusat produksi halal terkemuka di dunia. Keberhasilan ini sekaligus akan memperkuat posisi Pakistan dalam peta ekonomi halal global yang semakin kompetitif.

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa kelima negara Muslim yang diteliti Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan memiliki pola kontribusi sektor halal yang berbeda sesuai dengan prioritas kebijakan dan struktur ekonominya. Indonesia dan Malaysia menonjol dalam pengembangan ekosistem halal nasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kedua negara ini menunjukkan pertumbuhan signifikan pada subsektor makanan halal dan keuangan syariah, didukung oleh regulasi yang kuat serta peran aktif lembaga pemerintah dalam pengawasan dan sertifikasi halal.

Arab Saudi dan Qatar, di sisi lain, lebih unggul pada subsektor pariwisata halal dan keuangan syariah. Keduanya berhasil memanfaatkan strategi diversifikasi ekonomi pasca-minyak melalui *Saudi Vision* 2030 dan *Qatar National Vision* 2030. Fokus kebijakan tersebut mendorong peningkatan investasi halal, pengembangan destinasi wisata ramah Muslim, serta penguatan sistem keuangan syariah yang berorientasi global.

Sementara itu, Pakistan memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang pada sektor makanan dan tekstil halal karena ketersediaan sumber daya pertanian yang melimpah dan pasar domestik yang besar. Namun, negara ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, belum optimalnya sistem sertifikasi halal internasional, serta akses pembiayaan syariah yang terbatas.(Zuhra & Alim, 2024)

Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa negara dengan dukungan kebijakan, infrastruktur, dan sistem sertifikasi halal yang kuat seperti Indonesia dan Malaysia memiliki kontribusi sektor halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang lebih tinggi. Sebaliknya, negara yang masih menghadapi tantangan struktural seperti Pakistan menunjukkan pertumbuhan yang relatif lambat. Adapun negara-negara Teluk, yaitu Arab Saudi dan Qatar, menonjol dari sisi efisiensi dan fokus pada pengembangan sektor halal premium, khususnya pariwisata halal dan investasi keuangan syariah berskala internasional.(Salsabila & Putri, 2025).

Tabel 1. Kontribusi Sektor Halal terhadap PDB Negara Muslim Tahun 2024-2025

| Negara | Subsektor Dominan | Kontribusi terhadap PDB (Estimasi %) | Faktor Pendorong Utama |
|---|---|---|---|
| Indonesia | Makanan halal, fashion muslim, keuangan syariah | 7.2% – 8.1% | Regulasi BPJPH, MEKSI 2025, dukungan UMKM |
| Malaysia | Makanan halal, kosmetik, farmasi, keuangan syariah | 7.0% – 7.4% | Sistem sertifikasi JAKIM, Halal Industry Master Plan 2030 |
| Arab Saudi | Pariwisata halal, keuangan syariah | 6.5% – 6.8% | Program Vision 2030, ekspansi pariwisata haji & umrah |
| Qatar | Keuangan syariah, pariwisata halal premium | 5.5% – 6.0% | Qatar National Vision 2030, investasi syariah global |
| Pakistan | Makanan halal, tekstil halal | 4.2% – 4.8% | Potensi pertanian, kebijakan PHA, kendala infrastruktur |

*Sumber Diolah 2025*

Berdasarkan data pada tabel, Indonesia dan Malaysia tercatat memiliki kontribusi sektor halal tertinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Kedua negara ini berhasil mengembangkan sektor makanan halal dan keuangan syariah secara signifikan melalui kebijakan pemerintah yang pro-halal, sistem sertifikasi yang kuat, serta dukungan kelembagaan yang terintegrasi. Sinergi antara sektor publik, swasta, dan lembaga keuangan syariah menjadikan ekosistem halal di kedua negara ini tumbuh pesat dan berkelanjutan. Selain meningkatkan nilai tambah ekonomi, keberhasilan tersebut juga memperkuat posisi Indonesia dan Malaysia sebagai pusat industri halal global.(Cupian et al., 2021).

Arab Saudi dan Qatar memperlihatkan kontribusi sektor halal yang lebih dominan dari sektor jasa, terutama pariwisata halal dan investasi keuangan syariah. Kedua negara Teluk ini berhasil memanfaatkan

momentum diversifikasi ekonomi melalui pengembangan pariwisata berbasis syariah dan sistem keuangan Islam yang efisien. Di sisi lain, Pakistan masih menunjukkan kontribusi yang relatif rendah, namun memiliki potensi besar untuk tumbuh di masa depan. Dengan dukungan peningkatan infrastruktur, harmonisasi standar sertifikasi halal, dan kebijakan ekspor yang lebih agresif, Pakistan dapat memperkuat daya saingnya dalam rantai nilai global industri halal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sektor halal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara Muslim, meskipun dengan karakteristik dan fokus yang berbeda-beda. Indonesia dan Malaysia menunjukkan kinerja terbaik berkat dukungan regulasi, infrastruktur sertifikasi, dan ekosistem halal yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Arab Saudi dan Qatar menonjol dalam sektor jasa, khususnya pariwisata halal dan keuangan syariah, sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi pasca-minyak. Sementara Pakistan masih berada pada tahap penguatan dasar, namun memiliki potensi besar untuk tumbuh melalui peningkatan infrastruktur dan kebijakan investasi yang lebih adaptif. Secara keseluruhan, keberhasilan pengembangan ekonomi halal sangat ditentukan oleh sinergi kebijakan pemerintah, dukungan kelembagaan, serta inovasi industri dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif.

## DAFTAR REFERENSI

Azmi Aidina et al. (2023). Dampak perekonomian Indonesia terhadap eksistensi industri halal, 1, 36.

Cupian Cupian et al. (2021). Perkembangan sektor keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi: Studi empiris negara OKI. *Al-Tijary*, 6(1), 261.

Diana Wijayanti and Nurul Fatmah. (2025). *Comparative analysis and development of the Indonesian and Malaysian halal industries reviewed based on the global Islamic economy*, 26.

Endy Muhammad Astiwara. (2023). Analisis dampak kebijakan sertifikasi halal terhadap pertumbuhan industri pangan, 43.

Miftahul Jannah. (2024). Analisis tantangan dan peluang industri halal di Indonesia, 7, 361.

Nuril Kamiliyah et al. (2024). Dinamika industri halal di Indonesia: Analisis aspek permintaan, 03(01), 23.

Rina Samsiyah Agustina et al. (2024). Analisis peluang, tantangan, dan strategi industri halal di Indonesia. *Al-Musahamah: Journal of Islamic Economics, Finance, and Business*, 1(1), 37.

Roni Ardiansah et al. (2023). Analisis pengaruh sektor industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota OKI, 37.

Safana Salsabila and Juliana Putri. (2025). Peluang ekonomi dan tantangan regulasi dalam industri halal di Indonesia: Sebuah analisis strategis, 04(01), 271.

Salsabila Firdausiyah and Muhammad Zaky Hermawansyah. (2025). Analisis SWOT kontribusi pasar halal Malaysia terhadap ekonomi global. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan*, 2(3), 22–36.

Sastri Aida Zuhra and Mubarok El Alim. (2024). Kontribusi sektor pariwisata halal terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam membangun perekonomian berkelanjutan. *Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 261.

Sitti Saleha Madjid. (2021). Analisis peluang, tantangan dan strategi industri halal di Indonesia (pada masa pandemi Covid-19), 36.

Zul Ihsan Mu'arrif. (2024). Dampak industri halal pada perekonomian di Indonesia: Pengaruh pendapatan, ekspor, dan FDI terhadap PDB melalui pendekatan GMM. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(9), 72.